

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Desa Bangga dalam Mengimplementasikan peraturan desa tentang pengelolaan lahan mangrove sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah desa mengenai peraturan desa tentang pengelolaan lahan mangrove merupakan rumusan yang dilakukan pemerintah daerah dalam merancang dan merencanakan pembangunan daerahnya melalui visi, misi, dan program unggulan pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD). Untuk membangun desa tersebut diperlukan unsure-unsur yang mendukung jalanya pembangunan desa, baik peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat atau ekonomi, peningkatan kesehatan, sosial, budaya, guna untuk menunjang peningkatan sumber daya yang ada didaerah tersebut. Jika beberapa aspek yang telah disebutkan diatas telah terpenuhi maka dengan sendirinya program pemerintah desa tentang pengelolaan lahan mangrove di Desa Bangga akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Bangga. Pada setiap daerah masalah pengelolaan lingkungan secara baik dan tepat bukanlah merupakan masalah yang jarang muncul. Masalah ini tentunya menjadi perhatian pemerintah desa untuk bagaimana dapat mengatasi masalah lingkungan di desa agara dapat mendukung pembangunan Desa Bangga itu sendiri. Untuk

mengatasi hal ini pemerintah Desa dalam program pembangunan Desa salah satunya adalah pengelolaan lahan mangrove, yang kemudian kebijakan ini dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut: a) Program pelatihan dan penguatan kapasitas aparat desa, pemetaan kawasan lahan mangrove, pengembangan kelompok sadar lingkungan, penyuluhan dan penyadaran konservasi sumber daya alam secara berkala dan berkesinambungan. b) Program penunjang lainnya. Indikator program yang akan dicapai adalah: a) Meningkatnya kapasitas pemerintah dan aparat desa dalam melaksanakan peraturan desa yang telah dibuat. b) Tercapainya kesadaran lingkungan terhadap masyarakat Desa Bangga agar kondisi lahan mangrove di Desa Bangga dapat terjaga dengan baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terbentuknya peraturan desa, diantaranya adalah faktor kemiskinan, faktor kemiskinan yang tinggi masih menjadi masalah bagi pemerintah desa sehingga membuat pemerintah kesulitan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Seperti kita ketahui pemerintah desa bangga masih sangat bergantung pada APBD untuk melaksanakan pembangunan di Desa Bangga. hal ini disebabkan karena perputaran ekonomi di Desa bangga masih lambat. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang memadai sehingga terjadi kesulitan dalam menjalankan program-program pemerintah, ketersediaan infrakstruktur desa dan kemampuan kelembagaan dari pemerintah dan aparat desa juga menghambat pemerintah dan aparat desa dalam mengimplementasikan peraturan desa tentang pengelolaan lahan mangrove. hal ini terjadi karena infrakstruktur dan sarana jalan untuk mengakses Desa Bangga masih buruk sehingga menjadikan Desa Bangga masih

tergolong desa yang terisolir. keterbatasan sarana pendidikan juga berpengaruh sehingga masyarakat desa bangga yang mengenyam pendidikan masih sangat kurang.

3. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat agar Peraturan Desa tersebut dapat berjalan dengan baik berdasarkan hasil penelitian adalah pemerintah membentuk kelompok sadar lingkungan pada masyarakat di Desa Bangga guna membantu pemerintah menjaga dan melestrikan lahan mangrove yang ada di Desa Bangga.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran dari peneliti:

1. Untuk pemerintah Desa, Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan desa tentang pengelolaan lahan mangrove, agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung kebijakan yang telah dibuat, sebab faktor tersebut merupakan potensi yang dapat mendukung maksimalnya pelaksanaan suatu kebijakan apabila lebih dioptimalkan.

2. Untuk masyarkat desa, kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, produktifitas dan kesadaran terhadap lingkungan khususnya kawasan lahan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Meleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Hamzah, jur. Andu. 2006. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Saparinto, Cahyo. 2007. *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove*. Semarang: Dahara Prize.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: cv Alvabeta
- Nugroho, D Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komplitudo
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a. 2009. *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gunawan, Imam. 2013 *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ali Faried dan Alam Andi Syamsu. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Refika Aditama
- Adjie, Zulfikar. 2015. *Skripsi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Studi Kasus Pada Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa di Kabupaten Boalemo*. Program Studi Pendidikan

Pancasila Dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Olii, Sintia. 2015. *Skripsi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Studi Kasus di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo*. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

Tambunan, Ridwan. 2005. *Jurnal Studi Pembangunan Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Asahan Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan*.

Arsyad, Lincoln. 2011. *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Hapsari, Tunjung. 2011. *Skripsi Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yudha, Okta Ryan Pranata. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Nasir, Muhamad. 2007. *Skripsi Manajemen Sumber Daya Manusia Di BMT AL-Ikhlas Yogyakarta*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Unifersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sumber Lain:

<http://faruqidj.blogspot.com/2012/01/peraturan-desa.html> Diakses pada: 13.53 WITA, 10 Maret 2015

http://ekosistem.hutan.mangrove.manfaat.dan.pengelolaannya._informasi.tanaman.kehutan.html Diakses pada: 13.53 WITA, 10 Maret 2015

<http://www.wawasanpendidikan.com/2014/08/peran-partisipasi-masyarakat-dalam.html> Diakses pada: 16.00 WITA, 3 April 2016

<http://www.tipepedia.com/2015/08/teori-kelembagaan-menurut-pendapat-pada.html> Diakses pada: 16.00 WITA, 3 April 2016